Pengembangan Model Kontribusi Network Governance dalam Value Chain untuk Meningkatkan Keunggulan Bersaing Usaha Perikanan Tangkap

(Survei Pada Nelayan Perikanan Tangkap Di Kabupaten Indramayu)

IMAS SOEMARYANI, ERNIE TISNAWATI, DEKI FERMANSYAH

Program Doktor Manajemen Bisnis Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

Email korespondensi: dekifirmansyah0@gmail.com

Abstrak

Dengan panjang pantai 81.000 km, Indonesia memiliki potensi ekonomi laut setara dengan 12.000 trilyun rupiah. Pulau Jawa dan Bali merupakan penghasil perikanan tangkap terbesar di Indonesia, dan Jawa Barat menduduki urutan ke dua terbesar produksi perikanan tangkap di Pulau Jawa, dan di Provinsi Jawa Barat itu sendiri, Kabupaten Indramayu memiliki potensi ikan laut terbesar. Dengan potensi produksi terbesar ini, seharusnya Kabupaten Indramayu mampu meningkatkan kesejahteraan para nelayannya, tetapi dikarenakan sistem rantai penjualan hasil tangkapan nelayan kurang berpihak pada nelayan, maka para nelayan di Kabupaten Indramayu belum memiliki keunggulan bersaing dalam menjalankan aktivitas usaha perikanan tangkapnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *network governance* pada ekosistem, saat panen, saat proses produksi dan produk sampai kepada tangan konsumen. Dengan demikian yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah para nelayan, pedagang besar (pengumpul), pedagang eceran dan lembaga-lembaga lain terkait dengan *network governance* di Kabupaten Indramayu. Metode yang digunakan adalah *explanatory survey* dan *focus group discussion*. Penelitian ini menghasilkan sebuah pengembangan model kontribusi *network governance* dalam *value chain* untuk meningkatkan keunggulan bersaing usaha perikanan tangkap di Kabupaten Indramayu.

Kata Kunci : Jaringan pemerintahan, rantai nilai, ekosistem

The Development Model of Network Governance Contribution in The Value Chain to Improve Capture Fisheries Enterprise Competitive Advantage

(Survey on Fishery Catch Fisherman in Indramayu Regency)

Abstract

With 81,000 km long coast, Indonesia has the marine economy potential equivalent to 12,000 trillion. Java and Bali is the largest producer of capture fisheries in Indonesia, and West Java ranks second largest fisheries production in Java island Java, and in West Java itself, Indramayu District has the largest potential for marine fish. With this the largest production potential, Indramayu district should be able to increase the welfare of fishermen, but due to the sales chain system fishermen catch less in favor of the fishermen, the fishermen in Indramayu not have a competitive advantage in running their fisheries activities. This study aims to analyze the implementation of network governance in the ecosystem, at harvest, during the production process and product to the consumer. Thus the unit of analysis in this study were fishermen, wholesalers (collector), retailers and other institutions associated with network governance in Indramayu. The method used is an explanatory survey and focus group discussions. This research resulted in a contribution to the development of network governance models in the value chain to increase competitive advantage to fishing in Indramayu.

Keywords: Network governance, value chain, ecosystem

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Menurut data bakorsurtanal (2014) panjang pantai mencapai 81.000 km. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, potensi ekonomi laut Indonesia mencapai 1,2 triliun dollar AS pertahun, atau setara dengan 12.000 triliun rupiah. Potensi sumber daya laut yang demikian besar seharusnya mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan di Indonesia. Namun yang terjadi sebaliknya, nelayan di Indonesia mengalami kondisi yang tidak diharapkan. Suatu contoh di Jawa Barat, menurut data BPS Jawa Barat tahun 2013, garis kemiskinan di Jawa Barat bulan September 2012 sebesar Rp. 242.104 mengalami peningkatan sebesar 4,61 persen dibandingkan dengan garis kemiskinan bulan Maret 2012 (Rp. 231.438). Untuk daerah perkotaan garis kemiskinan bulan September 2012 sebesar Rp. 249.170 atau naik 4,17 persen dari kondisi Maret 2012 (Rp. 239.189). Garis kemiskinan di daerah perdesaan mengalami peningkatan yang lebih tinggi yaitu 5,52 persen menjadi sebesar Rp. 228.577 dibandingkan dengan kondisi Maret 2012 yaitu sebesar Rp. 216.221.

Menurut Dahuri (2001), proses pemanfaatan sumber daya perikanan harus ada kesamaan visi pembangunan perikanan yaitu suatu pembangunan perikanan yang dapat memanfaatkan sumber daya ikan beserta ekosistemnya secara optimal bagi kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia, terutama nelayan secara berkelanjutan. Untuk dapat mewujudkan visi pembangunan perikanan tersebut, ada tiga syarat mutlak yang harus dipenuhi. Pertama sektor perikanan harus mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi secara nasional melalui

peningkatan devisa, peningkatan pendapatan rata-rata para pelakunya serta mampu meningkatkan sumbangan terhadap PDB. Kedua, sektor perikanan harus mampu memberikan keuntungan secara signifikan kepada pelakunya dengan cara mengangkat tingkat kesejahteraan para pelaku perikanan. Ketiga, pembangunan perikanan yang akan dilaksanakan selain dapat menguntungkan secara ekonomi juga ramah secara ekologis yang artinya pembangunan harus memperhatikan kelestarian dan daya dukung lingkungan dengan baik. Di lapangan masih ditemukan kasus kerusakan ekosistem dalam eksplorasi wilayah perikanan dan kelautan. (www.rokhmindahuri.info, diakses tanggal 16 Maret 2013).

Menurut Fauzie (2009) dalam pasca.unand.ac.id (diakses 22 Mei 2013), perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan didasarkan pada konsepsi pembangunan berkelanjutan yang didukung oleh pengembangan industri berbasis sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dalam mencapai daya saing yang tinggi. Tiga hal pokok yang akan dilakukan terkait arah pembangunan sektor perikanan ke depan, yaitu (1) membangun sektor perikanan yang berkeunggulan kompetitif (*competitive advantage*) berdasarkan keunggulan komparatif (*comparative advantage*); (2) menggambarkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan; (3) mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah. Dalam konteks pola pembangunan tersebut, ada tiga fase yang harus dilalui dalam mentransformasi keunggulan komparatif menjadi keunggulan dalam hal daya saing, yaitu (a) fase pembangunan yang digerakkan oleh kelimpahan sumber daya alam (*resources driven*); (b) fase kedua

Tabel 1 Produksi Perikanan Tangkap di Pulau Jawa Tahun 2005-2011

Provinsi	Perikanan Laut (Ton)						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1 DKI Jakarta	132,024	137,570	146,240	144,718	145,970	172,422	180,198
2 Jawa Barat	155,341	149,490	167,288	176,449	172,747	180,405	185,825
3 Jawa Tengah	192,586	193,554	154,442	174,831	195,636	212,635	251,536
4 D.I Yogyakarta	1,773	1,731	2,629	1,939	4,239	4,239	3,954
5 Jawa Timur	322,292	374,620	382,877	394,262	395,510	338,918	362,624
6 Banten	58,712	57,745	61,679	55,858	57,257	57,254	57,891
7 J A W A	862,728	914,710	915,155	948,057	971,359	965,873	1,042,028

Sumber : <http://www.bps.go.id> diakses pada 22 Mei 2013

adalah pembangunan yang digerakan oleh investasi (*investment driven*) dan; (c) fase ketiga pembangunan yang digerakkan oleh inovasi (*innovation driven*). Dan semua hal itu terkait dengan *stakeholder*, seperti pemerintah, swasta, LSM lingkungan hidup, masyarakat, ilmuwan dalam *network governance* di model rantai nilai.

Berdasarkan provinsi, produksi perikanan tangkap di Pulau Jawa tahun 2011, terbesar adalah Jawa Timur lalu peringkat kedua diduduki oleh Jawa Tengah sedangkan Jawa Barat ada di urutan ketiga, sebesar 185,825 ton.

Wilayah utara Jawa Barat merupakan penghasil ikan laut tangkapan dengan jumlah terbanyak di Propinsi Jawa Barat. Pada tahun 2006 jumlah ikan laut tangkapan yang dihasilkan wilayah utara Jawa Barat mencapai 134 936.97 ton (90.3% dari total produksi perikanan laut tangkap Jawa Barat) dengan nilai mencapai Rp. 784.5 milyar, sedangkan hasil perikanan laut tangkapan daerah selatan Jawa Barat hanya mencapai 14 552 ton (9.7% dari total produksi perikanan tangkap laut Jawa Barat) dengan nilai mencapai 106.5 milyar (Dinas Perikanan Jawa Barat, 2008). Daerah utama penghasil ikan laut tangkapan di wilayah utara Jawa Barat terdapat di Kabupaten Indramayu, Cirebon, serta Subang. (fateta.ipb.ac.id diakses pada 22/5/2013 pada 18.45).

Sekretaris Forum Nelayan (Fornel) Kabupaten Jepara Solikul mengatakan jaminan ketersediaan BBM bersubsidi untuk nelayan oleh pemerintah sangat diperlukan, karena saat ini penghasilan para nelayan cenderung turun. (metrotvnews.com Senin, 29 April 2013). Penghasilan nelayan tradisional di pantura kian tak pasti karena cuaca ekstrem dan rusaknya ekosistem pantai. Sejumlah nelayan yang memiliki modal memilih menjadi tenaga kerja Indonesia sebagai awak kapal nelayan modern di Korea. (http://cetak.kompas.com diakses pada 29 April 2013).

Sistem rantai penjualan hasil tangkapan nelayan sampai saat ini dirasa kurang berpihak pada nelayan. Panjangnya rantai penjualan hasil tangkapan menjadikan harga ikan tangkapan menjadi rendah. Dalam setiap proses penjualan terdapat 4-5 rantai yang harus dilalui hingga sampai kekonsumen akhir. Rantai yang terlalu panjang ini harus dapat

diputus sehingga harga jual ikan menjadi tinggi dan nelayan dapat menikmatinya. (http://indramayu.perairanindonesia.com diakses pada 27 Januari 2013). Karena itu, langkah awal untuk meningkatkan daya saing industri perikanan, setidaknya kita perlu menangkap berbagai fenomena yang dihadapi oleh para nelayan. Di antaranya yaitu tingginya bahan bakar minyak, masih minimnya hasil tangkapan ikan, dikarenakan terbatasnya peralatan, hasil tangkapan ikan tidak dapat memenuhi skala ekonomis, hasil produksi ikan tidak bertahan lama, jarak antara pantai dengan lokasi penangkapan ikan tidak sesuai dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk bahan bakar agar sampai ke lokasi tersebut dan daya serap produk ikan sangat terbatas. (www.rokhmindahuri.info, diakses tanggal 16 Maret 2013).

Maka berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini menarik untuk dikaji dan dikembangkan bagaimana *network governance* dalam manajemen rantai nilai pada usaha perikanan nelayan di Jawa Barat. Penelitian ini, akan dibatasi pada kabupaten Indramayu, karena kabupaten Indramayu memiliki jumlah nelayan penuh yang terbanyak di Jawa barat, yaitu 32,792 nelayan (Diskanlut Jabar, 2009 dalam http://repository.ipb.ac.id diakses pada 27 Januari 2014 pada 23.45) artinya, di kabupaten Indramayu, semua nelayan menggantungkan hidup sebagai penangkap ikan di laut dengan memakai peralatan tradisional dan pada masa paceklik pun mereka tetap melaut (http://lontar.ui.ac.id diakses pada 28 Januari 2014).

Dengan melihat fenomena di atas, dapat diketahui persoalan kemiskinan nelayan merupakan suatu hal yang sangat kompleks, dimana banyak faktor yang mempengaruhinya. Dalam ilmu pemasaran dikenal sebagai analisis rantai nilai (*value chain analysis*). Dimana dalam menciptakan suatu produk harus melibatkan seluruh bagian secara holistik. Menurut Porter (1994) dalam analisis rantai nilai terdapat 5 aktivitas utama dan 4 aktivitas pendukung untuk menciptakan suatu produk atau nilai pelanggan. Aktivitas utama dalam rantai nilai meliputi *inbond logistic, operation, outbond logistics, marketing and sales, service*. Sedangkan aktivitas pendukung dalam rantai nilai meliputi *human resources management, firm infrastructure, technological supporting, dan procurement*. Dalam konteks di

industri kelautan, rantai nilai inilah yang akan mampu menghasilkan produk yang memiliki keunggulan bersaing (*competitive advantage*). Namun nelayan secara individual tidak akan mampu menerapkan manajemen rantai nilai. Sehingga perlu ada suatu cara bagaimana agar persyaratan minimal didalam rantai nilai industri perikanan dapat mereka penuhi.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan diteliti sebagai berikut. Pertama, bagaimana implementasi *network governance* pada ekosistem di industri perikanan tangkap Indramayu. Kedua, bagaimana implementasi *network governance* pada saat panen ikan di industri perikanan tangkap Indramayu. Ketiga, bagaimana implementasi *network governance* pada saat proses produk setelah panen di industri perikanan tangkap Indramayu. Keempat, bagaimana implementasi *network governance* pada saat produk di tangan konsumen. Kelima, bagaimana alternatif pemecahan masalah pada *network governance* agar pelaku usaha perikanan (nelayan) bisa meningkat produktifitasnya.

Sesuai dengan identifikasi masalah, penelitian ini bertujuan untuk menggali data dan informasi. Pertama, untuk memperoleh gambaran implementasi *network governance* pada ekosistem di industri perikanan Indramayu. Kedua, untuk memperoleh gambaran implementasi *network governance* pada saat panen ikan di industri perikanan Indramayu. Ketiga, untuk memperoleh gambaran implementasi *network governance* pada saat proses produk setelah panen di industri perikanan Indramayu. Keempat, untuk memperoleh gambaran implementasi *network governance* pada saat produk di tangan konsumen. Kelima, untuk memperoleh alternatif pemecahan masalah pada *network governance* agar pelaku usaha perikanan (nelayan) agar bisa meningkat produktifitasnya.

KAJIAN LITERATUR

Rantai Nilai

Menurut Porter (1994:33) keunggulan bersaing tidak dapat dipahami dengan memandang sebagai suatu keseluruhan. Pernyataan Porter (1994:33) menjelaskan bagi kita bahwa untuk mencapai keunggulan bersaing suatu industri harus mampu melakukan analisis rantai nilai dari berbagai aktivitas

bisnis. Berikut ini merupakan rantai nilai yang dikemukakan oleh Porter (1994:33) pada gambar 2.1 berikut ini :

Sumber: Porter (1994:37)

Gambar 1 Rantai Nilai Generik

Porter (1994:33) mengemukakan bahwa rantai nilai suatu industri berbeda-beda. Hal tersebut mencerminkan riwayat strategi dan keberhasilan pelaksanaan. Satu perbedaan penting bahwa rantai nilai suatu industri berbeda dalam cakupan bersaing dengan yang dimiliki oleh pesaingnya. Hal tersebut merupakan sumber keunggulan bersaing yang potensial. Suatu industri yang melayani satu segmen pasar memungkinkan industri menyesuaikan rantai nilainya dengan segmen tersebut dan menghasilkan biaya yang relatif lebih rendah atau diferensiasi.

Kegiatan bisnis perlu menetapkan tingkat yang relevan untuk membangun rantai nilai sebagaimana yang dikemukakan oleh Porter (1994:33) bahwa tingkat yang relevan untuk membangun rantai nilai adalah aktivitas perusahaan dalam industri tertentu (unit usaha). Menurut Porter (1994) *Value Chain* merupakan model yang digunakan untuk membantu menganalisis aktivitas-aktivitas spesifik yang dapat menciptakan nilai dan keuntungan kompetitif bagi organisasi. Analisis rantai nilai memperlihatkan organisasi sebagai sebuah proses yang berkelanjutan dalam kegiatan penciptaan nilai. Analisis dilakukan dengan cara mempelajari potensi penciptaan nilai. Porter membagi aktivitas-aktivitas kedalam dua kategori. Pertama adalah *primary activities*, Kedua adalah *support activities*. Bila dijabarkan, aktivitas-

aktivitas tersebut mencakup :

Aktivitas Primer

Inbound Logistics (logistik ke dalam), dihubungkan dengan menerima, menyimpan, dan menyebarkan input-input ke produk. Termasuk di dalamnya penanganan bahan baku, gudang dan kontrol persediaan.

Operations (operasi), segala aktivitas yang diperlukan untuk mengkonversi input-input yang disediakan oleh logistik masuk ke bentuk produk akhir. Termasuk di dalamnya permesinan, pengemasan, perakitan, dan pemeliharaan peralatan.

Outbound Logistics (logistik ke luar), aktivitas-aktivitas yang melibatkan pengumpulan, penyimpanan, dan pendistribusian secara fisik produk final kepada para pelanggan. Meliputi penyimpanan barang jadi di gudang, penanganan bahan baku, dan pemrosesan pesanan.

Marketing and Sales (pemasaran dan penjualan), aktivitas-aktivitas yang diselesaikan untuk menyediakan sarana yang melaluinya para pelanggan dapat membeli produk dan mempengaruhi mereka untuk melakukannya. Untuk secara efektif memasarkan dan menjual produk, perusahaan mengembangkan iklan-iklan dan kampanye profesional, memilih jaringan distribusi yang tepat, dan memilih, mengembangkan, dan mendukung tenaga penjualan mereka.

Service (pelayanan), aktivitas-aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan atau memelihara nilai produk. Perusahaan terlibat dalam sejumlah aktivitas yang berkaitan dengan jasa, termasuk instalasi, perbaikan, pelatihan, dan penyesuaian.

Aktivitas Pendukung

Procurement (pembelian/pengadaan), aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk membeli input-input yang diperlukan untuk memproduksi produk perusahaan. Input-input pembelian meliputi item-item yang semuanya dikonsumsi selama proses manufaktur produk.

Technology development (pengembangan teknologi), aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk memperbaiki

produk dan proses yang digunakan perusahaan untuk memproduksinya. Pengembangan teknologi dapat dilakukan dalam bermacam-macam bentuk, misalnya peralatan proses, desain riset, dan pengembangan dasar, dan prosedur pemberian servis.

Human resources management (manajemen sumber daya manusia), aktivitas-aktivitas yang melibatkan perekrutan, pelatihan, pengembangan, dan pemberian kompensasi kepada semua personel.

Firm infrastructure (infrastruktur perusahaan atau general administration (administrasi umum), infrastruktur perusahaan meliputi aktivitas-aktivitas seperti general management, perencanaan, keuangan, akuntansi, hukum, dan relasi pemerintah, yang diperlukan untuk mendukung kerja seluruh rantai nilai melalui infrastruktur ini, perusahaan berusaha dengan efektif dan konsisten mengidentifikasi peluang-peluang dan ancaman-ancaman, mengidentifikasi sumber daya dan kapabilitas, dan mendukung kompetensi inti.

Rantai nilai memberikan cara sistematis untuk membagi suatu perusahaan kedalam berbagai aktivitas yang berbeda. Dengan menggunakan analisis rantai nilai perusahaan bisa mendeteksi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah (*non value added*) sehingga bisa dihilangkan (Porter, 1994:34).

Kontribusi *Network Governance* dalam Rantai Nilai Industri Perikanan

Menurut Mc Conney (2011) menyatakan bahwa konsep rantai nilai dirancang pertama kali oleh Porter (1985). Konsep ini dianggap memiliki kesamaan dengan konsep interaksi antara sosial-ekologi. Interaksi tersebut mencakup sistem tata kelola dan bagaimana interaksi antar sistem yang terdiri dari sistem yang akan diatur. Ide tentang rantai nilai diperluas untuk membawa lebih banyak unsur analisis institusional (Kaplinski dan Morris, 2000) dan sekarang juga masyarakat sipil dan dinamika kekuasaan (Keane, 2008). Gambar dibawah menjelaskan bagaimana langkah yang harus dilakukan untuk mencapai integrasi yang diinginkan. Dengan demikian, rantai nilai di industri perikanan tidak hanya dianggap sebagai komoditas komersial, tetapi lebih dari itu, industri perikanan juga dikaitkan dengan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, serta ekosistem. (Mc Conney, 2011).

Sumber : McConney (2011:2)

Gambar 2 Tata Kelola Jaringan Perspektif Rantai Nilai Industri Perikanan Masyarakat

Gambar 2 di atas menggambarkan perspektif bahwa dalam analisis rantai nilai industri perikanan harus didasarkan atas dasar kesehatan ekosistem yang baik. Pengolahan hasil laut, pemasaran dan perdagangan dapat berdampak pada kesehatan ekosistem, yaitu melalui praktek-praktek dari mulai teknologi panen hingga pembuangan limbah di darat. Untuk spesies ikan yang berpindah dan penyebaran yang luas, maka diperlukan perspektif regional dan atau internasional dalam tata kelola perikanan. Dalam menjaga ekosistem, para *stakeholders* yang beragam harus dilibatkan dalam kebijakan di sektor perikanan. Menurut McConney (2011) perspektif jaringan membantu dalam mengembangkan rantai nilai perikanan yang berkontribusi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Keunggulan Bersaing

Keunggulan bersaing menggambarkan cara suatu industri untuk memilih dan melaksanakan suatu strategi generik guna dan mempertahankan keunggulan bersaing. Menurut Porter (1994:61) terdapat tiga strategi generik yang dapat diterapkan dalam suatu industri, yaitu Strategi Keunggulan Biaya (*cost leadership*), Strategi Diferensiasi, Strategi Fokus.

Keunggulan biaya merupakan satu dari keunggulan bersaing yang dapat dimiliki suatu pelaku -industri. Porter(1994:67) menyatakan bahwa penentu biaya utama akan menentukan perilaku biaya aktivitas nilai, diantaranya : skala ekonomis, pola pendayagunaan kapasitas, keterkaitan antar hubungan, pemaduan, penetapan waktu, kebijakan yang sifatnya deskrit,

lokasi, dan faktor-faktor kelembagaan lainnya.

Suatu pelaku industri dapat meningkatkan diferensianya dengan dua cara pokok, suatu industri bisa menjadi lebih unik dalam melaksanakan aktivitas nilai yang sudah ada, atau pelaku-industri- bisa merekonfigurasi rantai nilainya dengan cara yang dapat meningkatkan keunikannya (1994:161). Berikut ini merupakan langkah-langkah analisis yang diperlukan untuk menentukan landasan dalam menyeleksi strategi deferensiasi. Pertama, menentukan pembeli sesungguhnya. Kedua, mengidentifikasi rantai nilai pembeli dan dampak perusahaan atas rantai nilai ini. Ketiga, menentukan susunan peringkat kriteria pembelian pembeli. Keempat, menilai sumber keunikan yang sudah ada atau yang mungkin ada dalam rantai nilai suatu industri. Kelima, mengidentifikasi biaya sumber diferensiasi yang sudah ada dan yang potensial. Keenam, memilih konfigurasi aktivitas nilai yang menciptakan diferensiasi paling bernilai bagi pembeli relatif terhadap biaya diferensiasi. Ketujuh, menguji daya tahan strategi diferensiasi yang telah dipilih. Kedelapan, menurunkan biaya dalam aktivitas yang tidak mempengaruhi bentuk diferensiasi yang telah dipilih.

Model rantai nilai merupakan alat analisis yang berguna untuk mendefinisikan kompetensi inti perusahaan di mana perusahaan dapat mengejar keunggulan kompetitif sebagai berikut: Keunggulan Biaya: dengan lebih baik memahami biaya dan menekannya keluar dari aktivitas penambahan nilai. Diferensiasi: dengan berfokus pada aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan kompetensi inti dan kemampuan untuk melakukannya lebih baik daripada pesaing (Porter, 1994: 27).

Dalam mendiagnosis keunggulan bersaing dan menemukan cara-cara guna meningkatkannya adalah rantai nilai (*value chain*), yang membagi suatu industri ke dalam berbagai aktivitas yang dijalankannya dalam mendesain, memproduksi, memasarkan, dan mendistribusikan produk. Cakupan bersaing (*competitive scope*) dapat berperan kuat dalam keunggulan bersaing melalui pengaruhnya pada rantai nilai. Hal tersebut memperkuat argumentasi bahwa suatu industri perlu menerapkan analisis rantai nilai untuk mencapai keunggulan bersaingnya. Keterkaitan

antara rantai nilai dengan keunggulan bersaing dapat dijelaskan sebagai berikut.

(Mc Conney : 2011)

METODE

Penelitian ini merupakan pengembangan model *network governance* bidang usaha perikanan tangkap nelayan di wilayah Indramayu. Penelitian ini menghasilkan model *network governance* pada rantai nilai industri perikanan tangkap di Indramayu dan hasil penelitian diharapkan dapat menjadi alternatif pemecahan masalah dalam meningkatkan keunggulan bersaing nelayan dipesisir Jawa Barat.

Variabel

Variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah *network governance* meliputi ekosistem, penangkapan, pengolahan dan konsumen dari rantai nilai perikanan tangkap. Dari *network governance* tersebut akan dianalisis baik secara internal maupun eksternal.

Data

Data yang akan digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer melalui penyebaran

kuesioner dan pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD).

Alat Analisis

Penelitian ini merupakan penelitian eksploratori survei.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi *network governance* pada ekosistem

Dari persepsi 100 responden dalam hal menjaga ekosistem 44% tidak menggunakan peledak. Sedangkan dalam tanggung jawab 41% responden menyatakan yang bertanggung jawab menjaga ekosistem laut adalah petugas AIROD atau polisi laut.

Implementasi *Network Governance* pada Saat Panen Ikan

Persepsi nelayan terhadap alat penangkap ikan yang dibutuhkan nelayan dalam *procurement*, terbanyak 60% responden menjawab jaring. Jadi alat-alat yang digunakan nelayan di Desa Eretan masih didominasi oleh alat sederhana. Dalam hal pengadaan kapal, terdapat 72% responden menjawab, pengadaan kapal dilakukan oleh nelayan sendiri (pribadi) sedangkan terendah 1% peranan pemerintah dalam pengadaan kapal.

Persepsi nelayan terhadap pengadaan alat penangkapan ikan masih didominasi oleh pribadi dimana terdapat 83% menjawab pengadaan alat penangkapan ikan berasal dari nelayan sendiri (pribadi). Hal ini mengindikasikan belum optimal peranan instansi terkait dalam pengadaan alat penangkap ikan. Pengadaan alat pendingin terbanyak 46% responden menjawab pengadaan alat pendingin dilakukan oleh KUD berupa es balok, sedangkan terendah adalah 1% menjawab menjawab pengadaan alat pendingin dilakukan oleh KUD berupa kotak/peti es.

Persepsi Nelayan terhadap Selisih Pendapatan dan Biaya operasional hasil tangkapan ikan mayoritas pendapatan nelayan tidak menentu, hal ini dipengaruhi oleh hasil tangkapan ikan dan harga dasar ikan di tempat pelelangan ikan (TPI). Persepsi nelayan terhadap jaminan keamanan dan keselamatan 81% responden menjawab tidak ada jaminan keamanan dan keselamatan bagi nelayan. Nelayan berharap

ada pihak yang memberi keamanan dan keselamatan bagi mereka, karena menurut nelayan, di laut saat ini banyak perompak. Jaminan keamanan dan keselamatan berdasarkan persepsi nelayan masih jauh dari yang diharapkan, karena masih didominasi oleh bantuan sesama nelayan. Padahal kebutuhan keamanan dan keselamatan saat mencari ikan diperlukan dengan banyaknya perompak dilaut. 44% responden menjawab bahwa penanggungjawab jaminan keamanan dan keselamatan nelayan adalah bantuan sesama nelayan itu sendiri, 3% responden menjawab tidak ada yang bertanggungjawab terhadap jaminan keamanan dan keselamatan nelayan. Hal ini mengindikasikan bahwa belum optimalnya peranan instansi terkait dalam menjamin keamanan dan keselamatan para nelayan.

Persepsi nelayan terhadap pelatihan dan penyuluhan penangkapan ikan, 69% responden menyatakan bahwa tidak ada pelatihan yang artinya mayoritas nelayan menyatakan bahwa ditempatnya tidak ada pelatihan cara penangkapan ikan. Hal ini mengindikasikan belum optimalnya peran instansi terkait dalam penyuluhan dan pelatihan penangkapan ikan. Persepsi nelayan terhadap terhadap siapakah yang mengadakan pelatihan dan penyuluhan penangkapan ikan 55% responden nelayan menyatakan pemerintah atau DKP yang mengajarkan mereka cara menangkap ikan. Persepsi nelayan tentang teknologi mesin kapal 83% responden menyatakan menggunakan mesin ukuran besar seperti jenis Diesel, Fuso, Mitsubishi D16. Sedangkan 17% responden adalah nelayan dengan kapal ukuran kecil yang juga menggunakan ukuran teknologi mesin yang kecil dan jarak melaut yang hanya berjarak. Persepsi terhadap siapakah yang melakukan pengembangan teknologi kapal 99% responden menyatakan pengembangan dilakukan dengan pinjaman dari KUD/Koperasi dalam bentuk uang (bagi anggota koperasi).

Persepsi terhadap teknologi pendingin ikan 94 % responden menggunakan es balok (tradisional). Pengembangan teknologi penangkapan ikan dikawasan perikanan tangkap Desa Eretan. 97% responden menyatakan pengembangan teknologi pendingin ikan dilakukan secara mandiri (nelayan). Hal ini mengindikasikan belum optimalnya peran instansi terkait dalam pengembangan teknologi pendingin ikan. Teknologi penangkapan ikan 78 %

responden menjawab masih mempergunakan cara-cara manual seperti jaring, tambang. Teknologi penangkapan ikan sebanyak 91 % responden menjawab menggunakan peralatan manual seperti jaring, alat tangkap yang digunakan oleh para nelayan berasal dari rajutan nelayan pengrajin jaring. Persepsi nelayan terhadap terhadap siapakah yang melakukan pengembangan teknologi alat penangkap ikan. 100% responden menyatakan mengembangkan teknologi penangkapan ikan dengan cara mandiri artinya tidak ada support sama sekali dari pemerintah padahal pemerintah mempunyai peranan penting dalam mengembangkan teknologi penangkapan ikan. Implementasi *Network Governance* pada Saat Pasca panen ikan di industri perikanan tangkap indramayu dibutuhkan dibutuhkan penguatan dan pengembangan pelabuhan perikanan sebagai pusat bisnis perikanan terpadu, pembangunan pasar ikan higienis, serta mempertemukan para produsen (nelayan dan pembudidaya ikan) dan para pembeli baik nasional maupun asing, karena saat ini, pengolahan pasca panen perikanan di Desa eretan secara terpadu tidak maksimal.

Implementasi Network Governance pada saat Produk Ditangan Konsumen

Persepsi Konsumen terhadap harga ikan di pasar hampir secara merata konsumen mempunyai pendapat yang berbeda-beda dengan persepsi harga ikan di pasar karena ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan, dan daya beli masing-masing konsumen. Persepsi Konsumen terhadap ketersediaan ikan di pasar ketersediaan ikan dipasar sangat baik atau sangat tersedia, dan jarang konsumen belum menggunakan internet dalam hal mengetahui stok dipasar. Ini didukung oleh belum adanya sistem di KUD atau TPI yang mempublish hasil tangkapan ikanny ke home page web atau internet terjadi kelangkaan ikan dipasar. Persepsi konsumen terhadap cara mengetahui stok di pasar. Persepsi konsumen terhadap dapatkan mengetahui stok ikan melalui internet 100% responden menyatakan tidak mengetahui. Hal ini dikarenakan belum adanya fasilitas dan sarana dari instansi terkait yang dapat membantu konsumen untuk dapat mengetahui stok ikan melalui internet. Persepsi konsumen terhadap apakah internet sudah digunakan dalam pemasaran produk belum adanya fasilitas dan sarana dari instansi terkait sehingga konsumen tidak pernah menggunakan internet untuk

mengetahui promosi produk ikan di internet. Persepsi konsumen terhadap teknologi yang digunakan dalam menangani keluhan mayoritas responden belum menggunakan teknologi dalam menyampaikan keluhan dan saran. Persepsi konsumen terhadap siapakah yang melakukan pengadaan teknologi untuk menangani keluhan dan saran konsumen 100% responden responden menjawab tidak tahu. Dari data ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa belum adanya sarana dan prasarana guna menangani keluhan dan saran, sehingga semua responden tidak tahu tentang siapakah yang melakukan pengadaan teknologi untuk keluhan dan saran.

SIMPULAN

Sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang didunia yakni mencapai 81.000 km, Indonesia sudah seharusnya memiliki sistem tata kelola (*network governance*) dalam rantai nilai (*value chain*) industri perikanan terhadap para nelayan, pedagang besar (pengumpul), pedagang eceran dan lembaga-lembaga lain terkait. Penelitian ini menganalisis implementasi *network governance* pada ekosistem, saat panen, saat pasca panen hingga produk sampai ke tangan konsumen. Interaksi tersebut mencakup sistem tata kelola dan bagaimana interaksi antar sistem yang terdiri dari sistem yang akan diatur. Penelitian ini menggunakan sampel di Kabupaten Indramayu sebagai penghasil ikan terbesar di wilayah utara Provinsi Jawa Barat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola terhadap ekosistem didominasi dengan perilaku nelayan tidak menggunakan bahan peledak, dan pengawasan dilakukan oleh AIROD atau polisi laut. Sedangkan tata kelola saat panen meliputi pengadaan kapal, alat tangkap, alat pendingin, jaminan keamanan dan keselamatan didominasi diadakan secara mandiri oleh nelayan. Pendapatan hasil tangkapan sangat dipengaruhi oleh hasil tangkapan ikan dan harga dasar ikan di tempat pelelangan ikan (TPI). Tata kelola pasca panen memanfaatkan KUD dan TPI sebagai lokasi transaksi sehingga dibutuhkan pengembangan pelabuhan perikanan sebagai pusat bisnis perikanan terpadu, pembangunan pasar ikan higienis. Tata kelola produk hingga ke tangan konsumen sangat memerlukan informasi terkait ketersediaan ikan di pasar melalui menggunakan internet.

DAFTAR PUSAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. <http://www.bps.jabar.go.id/> diakses 11 April 2014
- Badan Pusat Statistik. <http://www.bps.go.id/> diakses 14 Mei 2014
- Dahuri, R. (2010). *Akar Masalah Kemiskinan Nelayan dan Solusinya*. Blog:rohmindahuri.info.
- Dinas Perikanan dan Kelautan, <http://diskanlut.jabar.go.id/>diakses 23 April 2014
- Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor. <http://www.fateta.ipb.ac.id/> / diakses 9 Februari 2014
- <http://bakorsurtanal.go.id/>diakses 21 April 2014
- Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. <http://www.kkp.go.id/> diakses 18 Mei 2014
- Mc Conney, P., (2011). *Centre for Resource Management and Environmental Studies*. The University of the West Indies: Barbados.
- Porter, M. E., (1992) *Strategi Bersaing Teknik Menganalisis Industri dan Pesaing*. Cetakan Kelima: Penerbit Airlangga.
- Porter, M. E., (1994). *Keunggulan Bersaing Menciptakan dan Mempertahankan Kinerja Unggul*. Cetakan ketiga: Penerbit Airlangga.
- Sekaran, U., & Roger, B. (2009). *Research Methods For Busines*:Wiley.
- Suhana. (2012). *Evaluasi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Indonesia*: PPT Kiara.